

**DETERMINAN PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)**

Skripsi

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Akuntansi di Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ALKAUSAR PUTRA BUDIMAN

15043066/2015

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKIRPSI
DETERMINAN PRAKTIK INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT

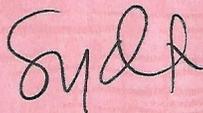
Nama : Alkausar Putra Budiman
NIM / BP : 15043066 / 2015
Jenjang Program : Strata 1 (S1)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 November 2021

Disetujui Oleh:

Mengetahui

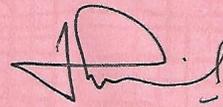
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, AK, CA., PH.D.

NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak.

NIP. 19771123 200312 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

**DETERMINAN PRAKTIK INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT**

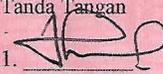
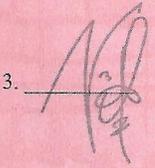
Nama : Alkausar Putra Budiman
NIM / BP : 15043066 / 2015
Jenjang Program : Strata 1 (S1)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Penguji Ujian Skripsi

Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Padang, 10 November 2021

| No. Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-------------|-----------------------------|--|
| 1. Ketua | Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak | 1.  |
| 2. Anggota | Vanica Serly, SE, M.Si | 2.  |
| 3. Anggota | Vita Fitria Sari, SE., M.Si | 3.  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alkausar Putra Budiman
NIM/Tahun Masuk : 15043066/2015
Tempat/Tanggal Lahir : Manna/02 Januari 1998
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : DETERMINAN PRAKTIK *INTERNET*
FINANCIAL REPORTING (IFR)
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Program Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karyatulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2021
Yang menyatakan,


Alkausar Putra Budiman
NIM. 15043066

Alkausar Putra Budiman 15043066/15043066. “Determinasi Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *internet financial reporting* (IFR) dalam website pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Sumber data diperoleh dari website resmi pemerintah daerah di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Data yang digunakan adalah data sekunder, karena data tersebut telah dirilis atau dipublikasikan oleh sejumlah media publik resmi baik berkala lokal atau pun nasional. Pada penelitian ini variabel penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi dua variabel utama yaitu variabel dependen yaitu *internet financial reporting*, sedangkan yang menjadi variabel independen terdiri dari tipe pemerintah daerah, umur administratif dan karakteristik kepala daerah.

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, sedangkan tahapan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t-statistik. Pengolahan data dilaksanakan dengan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pertama ditemukan Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Pada Pengujian Hipotesis kedua ditemukan Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat sedangkan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Sesuai dengan uraian hasil penelitian maka dapat diajukan saran bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela *internet financial reporting*, dengan cara mencoba menyusun anggaran untuk membenahi infrastruktur jaringan internet yang dapat mendorong kemajuan dalam pengungkapan *internet financial reporting* di masa mendatang. Selain itu saran juga dapat diberikan kepada peneliti dimasa mendatang diharapkan menambahkan satu variabel baru yang juga mempengaruhi jumlah pengungkapan *internet financial reporting* seperti persepsi kemdahan, persepsi risiko dan berbagai variabel lainnya.

Kata Kunci: *Internet Financial Reporting*, Tipe Pemerintah Daerah, Umur Administratif dan Karakteristik Pemerintah Daerah

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**DETERMINAN PRAKTIK INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)**”. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia untuk menuju jalan yang diridhai Allah SWT..

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan bantuan serta kemudahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si.Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1, Ibu Vita Fitria Sari, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Halmawati, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memperlancar penulis dalam menjalani dan menyelesaikan perkuliahan sampai akhirnya ke tahap ini.
5. Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku Dosen Penguji I dan Ibu Vita Fitria Sari, SE., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
7. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda Zaherman dan Ibunda Asmelia tercinta, saudaraku Adek Arief Kurnia illahi, Adek Rischa Permata Ameliza, dan Adek Muhammad Rizky Fadji, serta keluarga tercinta yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Spesial untuk yang terkasih Dhia Hanilya Rahmadani yang selalu menemani, menyemangati, membantu, menghibur dan seperjuangan dalam menghadapi suka duka Skripsi ini hingga akhirnya kita bisa lulus dan wisuda dihari yang sama.
9. Sahabat-sahabat "basecamp banpt" bro fajarot, bro rexcy, bro dolibegu, bro vegyx, bro ariefnyix, bro vwidi, bro rama, broajo tegar dan ade ranjau. Sahabat lainnya yang Satu Kota Bengkulu lainnya redho, dwiki, abim, piin bocil, kevin dan doni yang selalu mendukung, membantu dan menghibur penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Berkat kalian suasana perkuliahan menjadi lebih menyenangkan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2015 dan kakak senior yang telah memberikan semangat beserta dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ilmiah ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, namun apabila terdapat kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 10 November 2021

Alkausarr Putra Budiman

15043066

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teori..... | 11 |
| 1. Teori Stewardship..... | 11 |
| 2. Teori Signaling..... | 14 |
| 3. Teori Institusional..... | 16 |
| 4. Internet Financial Reporting..... | 18 |
| 5. Type Pemerintahan..... | 22 |
| 6. Umur Administratif..... | 23 |
| 7. Karakteristik Kepala Daerah..... | 24 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| C. Hipotesis Penelitian..... | 30 |
| a. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Praktik Internet Financial Reporting..... | 30 |
| b. Pengaruh Umur Administratif Terhadap Pratek Internet. Financial Reporting..... | 32 |
| c. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Pada Praktek Praktek Internet Financial Reporting..... | 33 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | | |
|----|---|----|
| A. | Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. | Populasi dan Sampel..... | 36 |
| | 1. Populasi..... | 36 |
| | 2. Sampel..... | 36 |
| C. | Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| D. | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 38 |
| | 1. Variabel Dependen..... | 38 |
| | 2. Variabel Independen..... | 39 |
| | a. Tipe Pemerintah Daerah..... | 39 |
| | b. Umur Administratif..... | 40 |
| | c. Kateristik Kepala Daerah..... | 41 |
| E. | Metode Analisis Data..... | 41 |
| | 1. Statistik Deskriptif..... | 42 |
| | 2. Uji Asumsi Klasik..... | 42 |
| | a. Uji Multikolinearitas..... | 42 |
| | b. Uji Heteroskedastisitas..... | 43 |
| | c. Uji Normalitas..... | 43 |
| | 3. Analisis Regresi Berganda..... | 44 |
| | 4. Pengujian Hipotesis..... | 44 |
| | 1. Uji t..... | 44 |
| | 2. Uji F..... | 45 |
| | 3. Koefisien Determinasi..... | 45 |

BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

| | | |
|----|--|----|
| A. | Gambaran Umum Daerah Penelitian..... | 47 |
| B. | Statistik Deskriptif..... | 48 |
| | 1. Pengungkapan Internet Financial Reporting Pada 19 Ka Bupaten dan Kota di Sumatera Barat..... | 48 |
| | 2. Deskriptif Tipe Pemerintah Daerah di Sumatera Barat..... | 50 |
| | 3. Deskriptif Umum Pemerinahan Administratif di Suma tera Barat..... | 51 |
| | 4. Deskriptif Karateristik Kepala Daerah di Sumatera Barat | 52 |
| C. | Hasil Pengujian Normalitas..... | 53 |
| D. | Pengujian Asumsi Klasik..... | 54 |
| | 1. Pengujian Multikolinearitas..... | 54 |
| | 2. Hasil Pengujian Autokorelasi..... | 55 |
| | 3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas..... | 56 |
| E. | Analisis Regresi Bergadan..... | 57 |
| F. | Analisis Koefisien Determinasi..... | 59 |
| G. | Hasil Pengujian F-statistik..... | 60 |
| H. | Hasil Pengujian t-statistik..... | 61 |
| I. | Pembahasan | |
| | 1 Pengaruh Tipe Kepala Daerah Terhadap Jumlah Internet Financial Reporting pada 19 Kabupaten dan Kota di Su matera Barat..... | 62 |
| | 2. Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Jumlah Pengugkapan Internet Financial Reporting pada 19 Ka bupaten dan Kota di Sumatera Barat..... | 64 |
| | 3. Pengaruh Katerakteristik Kepala Daerah Terhadap Jum lah Pengungkapan Internet Financial Reporting pada 19 | |

| | |
|---|----|
| Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat..... | 65 |
|---|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| Tabel 4.1 | Deskriptif Variabel Internet Financial Reporting 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2017 – 2019 | 49 |
| Tabel 4.2 | Deskriptif Tipe Pemerintahan di Sumatera Barat Tahun 2017 – 2019..... | 50 |
| Tabel 4.3 | Deskriptif Umur Pemerintahan Administratif di Sumatera Barat Tahun 2017 – 2019..... | 51 |
| Tabel 4.4 | Deskriptif Karakteristik Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2017 – 2019 | 52 |
| Tabel 4.5 | Hasil Pengujian Normalitas..... | 54 |
| Tabel 4.6 | Hasil Pengujian Multikolinearitas..... | 55 |
| Tabel 4.7 | Hasil Pengujian Autokorelasi..... | 55 |
| Tabel 4.8 | Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Glejser..... | 56 |
| Tabel 4.9 | Hasil Analisis Regresi Berganda..... | 56 |
| Tabel 4.10 | Hasil Analisis Koefisien Determinasi..... | 60 |
| Tabel 4.11 | Hasil Pengujian F-statistik..... | 60 |
| Tabel 4.12 | Hasil Pengujian t-statistik..... | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi informasi dalam penyaluran informasi keuangan melalui media internet (*internet financial reporting*) telah dilakukan oleh beberapa pemerintah di Indonesia sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada para *stakeholdernya*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* terkait.

Praktik IFR didorong dengan adanya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa adanya penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah, serta setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Styles & Tennyson (2007) mengungkapkan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online. *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua pemangku kepentingan publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat (Verawaty, 2015).

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah juga telah didorong untuk membangun situs Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010. Namun demikian, implementasi atas instruksi tersebut belum maksimal dan peraturan tersebut telah diubah sesuai perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan saat ini menjadi Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terdapat tiga jenis informasi yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah, yaitu informasi secara berkala (termasuk di dalamnya laporan keuangan pemerintah daerah), serta merta dan setiap saat.

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mayoritas pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan praktik IFR, dikarenakan pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (*voluntary disclosure*) sebab belum adanya sanksi yang mengikat (Nosihana& Yaya, 2016). Agustin (2014) telah melakukan penelitian serupa untuk membuktikan publikasi pengelolaan anggaran pada *website* Pemda di Sumatera Barat namun hasilnya masih banyak Pemda yang masih kurang dalam mewujudkan transparansi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan IFR pada *website* pemerintah daerah. Sekretariat Nasional FITRA merilis Survei Keterbukaan Anggaran (*Open Budget Survey*) menunjukkan bahwa indeks keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2017 berada pada level 64 dari 100 poin, yang artinya mengalami peningkatan dibandingkan survey dua tahun sebelumnya sebesar 59, setelah sempat turun pada 2006 sebesar 42, tahun 2008 sebesar 54, tahun 2010 sebesar 51, dan pada 2012 sebesar 62 poin (<https://tirto.id>). Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia pengguna internet Indonesia diperkirakan mencapai 123 juta orang di tahun 2018 peringkat 6 dari 25 negara teratas, diperingkat oleh pengguna internet saat ini (<http://kominfo.go.id>). Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan masyarakat akan pengungkapan informasi keuangan melalui internet.

Penerapan IFR diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang tengah menjadi perhatian khusus para

pemangku kepentingan pemerintah serta untuk menciptakan *good governance & clean governance*. Menurut *United Nation Development Program* dalam Madiasmo (2009) karakteristik pelaksanaan *good government* yakni, partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategik. Pelaporan merupakan salah satu tahap penting dalam akuntabilitas publik (Mahmudi, 2011). Akuntabilitas publik dapat dilihat dari seberapa besar tanggungjawab pemerintah daerah kepada seluruh lapisan *stakeholdernya* terutama kepada masyarakat yang telah memberikan hak kekuasaan kepada pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Dengan adanya praktik IFR di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan distribusi informasi secara merata pada seluruh lapisan *stakeholder* pemerintah daerah mengingat kendala luasnya kondisi geografis Indonesia sehingga dapat meminimalkan adanya *asimetri information*. Pelaporan keuangan di internet (IFR) sebenarnya merupakan cara pemda agar terlegitimasi (Alhajjriana et al, 2017). Legitimasi merupakan sebuah asumsi pihak eksternal bahwa suatu organisasi telah berjalan sesuai norma, aturan, dan keyakinan yang berlaku di masyarakat (Suchman, 1995). Dapat diartikan dengan adanya praktik IFR dapat meyakinkan *stakeholder* pemerintah daerah, terhadap kinerja yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Praktik pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi (*good governance & clean governance*) sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Sebagaimana isi intruksi peraturan tersebut agar tiap instansi pemerintah baik dari pusat hingga daerah membangun situs *website* nya masing-masing dalam upaya untuk memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat hingga akhirnya mampu menjadi *good governance*. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya (Febrianty dan Jatmiko, 2011). Kepala daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD. Oleh karena itu kepala daerah juga bertanggung jawab atas pengungkapan yang dilakukan.

Praktik IFR sebagai salah satu perwujudan *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan *good and clean governance*.

Penelitian mengenai determinan *Internet Financial Reporting* pada sektor pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya Laswad et al. (2005) menemukan bahwa *leverage, press visibility, type of council* dan kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada Pemda di New Zealand. Styles & Tennyson (2007) menemukan bahwa ukuran daerah, kualitas *accounting disclosure*, pendapatan per kapita dan tingkat hutang berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di internet, sedangkan ukuran daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap aksesibilitas laporan keuangan di internet pada *website* Pemda U.S. García & García-garcía (2010) menemukan bahwa ukuran pemda, *capital investment*, kompetisi politik dan *press visibility* berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela melalui internet pada Pemda di Spanyol. Di Indonesia, penelitian serupa telah dilakukan Puspita & Martani (2012) menemukan bahwa tingkat ketergantungan, ukuran pemerintahan, kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif, sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh negatif. Verawaty (2015) menemukan bahwa tidak terdapatnya hubungan positif antara ukuran pemda, pendapatan per kapita dan ukuran hutang. Nosihana & Yaya (2016) juga memukakan bahwa *leverage, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit* tidak berpengaruh positif, sedangkan kompetisi publik dan ukuran pemda berpengaruh positif.

Penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan atas saran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada peneliti

Destya (2019) yang berjudul Determinan Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan menggunakan variabel opini audit, tipe pemerintah daerah, umur administratif, tingkat ketergantungan dan indeks pembangunan manusia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni dengan menambahkan variabel umur administratif, tipe pemerintah daerah, dan karakteristik kepala daerah. Penelitian ini juga berfokus pada di Pemerintahan Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan pelaporan keuangan pada *website* di Provinsi Sumatera Barat belum menyesuaikan dengan intruksi kemendagri dan Provinsi Bengkulu juga peringkat terendah dalam penerapan *good governance* dan *clean governance*.

Penggunaan variabel umur administratif digunakan karena semakin lama umur administratif pemerintah daerah diasumsikan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan dalam *websitenya* (Rosita & Arifin, 2017). Variabel tipe Pemda digunakan dengan alasan adanya perbedaan karakteristik pemerintah daerah kabupaten dan kota diprediksi akan memberikan tingkat pengungkapan yang berbeda pada *website* Pemda. Dikarenakan tingkat akses internet daerah kota lebih tinggi daripada daerah kabupaten sehingga pemerintah daerah kota akan mengungkapkan informasi yang lebih besar pada *website* daripada pemerintah daerah kabupaten (Rahim & Martani, 2016).

Penggunaan variabel karakteristik kepala daerah digunakan untuk menggambarkan *age*, *education levels*, *tenure*, *aligment* dan *performance*.

Penambahan variabel karakteristik kepala daerah ini juga karena salah satu kewajiban kepala daerah adalah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi penggunaan karakteristik kepala daerah yang diambil dalam penelitian ini harus berlatar belakang pendidikan dari ekonomi/akuntansi dari kepala daerah tersebut agar berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (Rudi Ismoyo 2011). Penggunaan periode pemerintahan dari tahun ketahun belum menerapkan apa yang telah para peneliti teliti tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui *website* pemerintahan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui perkembangan keadaan terbaru semenjak implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mengetahui trend perkembangan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*internet financial reporting*). Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Determinan Praktik *Internet Financial Reporting (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting (IFR)* dalam *website* pemerintah daerah?

2. Apakah umur administratif berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?
3. Apakah karakteristik kepala daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah variabel tipe pemerintah daerah, umur administratif, dan karakteristik kepala daerah berpengaruh terhadap praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) di pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka diajukan beberapa manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar penelitian selanjutnya baik bagi mahasiswa maupun pihak akademisi yang lain pada bidang akuntansi sektor publik.
2. Bagi Pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan bahan evaluasi mengenai kinerja terutama transparansi dan akuntabilitas publik dalam menciptakan *good governance* dan *clean governance* melalui pengungkapan laporan keuangan melalui internet. Serta memberikan masukan bagi regulator untuk membentuk

regulasi mengenai *internet financial reporting* pada pemerintah daerah di Indonesia.

3. Bagi *stakeholder* Pemda, masyarakat sebagai *stakeholder* utama pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui media internet. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh lapisan *stakeholder* pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan Pemda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori *Stewardship*

Stewardship Theory menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Dalam konsep *stewardship* manajemen memiliki kedekatan dengan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari investor atau pun perusahaan. Selain itu pimpinan selalu lebih terbuka kepada *stakeholders*, khususnya berkaitan dengan informasi rencana dan strategi pengembangan usaha perusahaan dimasa mendatang, kondisi tersebut mendorong nama baik dan tata kelola perusahaan menjadi meningkat, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan.

Donaldson *et al.* (1997) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara *Agency Theory* dan *Stewardship Theory*. Pada *Agency Theory* terjadi konflik antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* adalah pihak

yang menguasai informasi, sehingga agen cenderung memanfaatkan informasi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan principal yaitu investor adalah individu yang merasa kepentingannya tidak terpenuhi dan merasa dirugikan. Berbeda hal dengan konsep stewardship yang justru terjadi kerja sama antara *agent* dan *principal*, dimana manajer berusaha membantu principal dengan lebih transparan dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Sehingga *stakeholders* khususnya investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Selain itu nama baik perusahaan dan reputasi manajer (*agent*) akan tetap terjaga.

Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal*. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai *agent*. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan *et al.* (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan *et al.* (1996) menunjukkan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai *steward* daripada *agent* yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Van Slyke (2006) juga menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka

sangat relevan jika Teori *stewardship* diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan.

Stewardship Theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal penting yang tersirat dalam *stewardship theory* berkaitan dengan upaya mendorong peningkatan kinerja organisasi, melalui upaya kerja sama dan transparansi informasi, baik bagi pihak internal ataupun pihak eksternal. Transparansi akan menciptakan kerja sama yang kesetaraan tujuan dari seluruh *stakeholder*. Penyajian informasi akan lebih transparan ketika manajemen mampu melaksanakan *internet financial reporting*. Melalui *internet financial reporting* seluruh *stakeholder* akan lebih mudah memperoleh informasi sebagai upaya mengambil keputusan yang tepat. Selain itu *internet financial reporting* akan mengurangi kemungkinan kecurangan oleh *agent*, sehingga dapat menjadi *image* atau reputasi yang dimiliki perusahaan.

Keterkaitan antara *stewardship theory* dengan *internet financial reporting* adalah sangat erat, dimana melalui *internet financial reporting* nama baik instansi akan semakin kuat dalam pandangan *stakeholders*. Oleh sebab itu untuk mendorong *internet financial reporting* pemerintah daerah akan berusaha memperbaiki infrastruktur yang dimiliki oleh tipe pemerintah daerah yang dapat diamati dari bentuk daerah administratif apakah berbentuk kabupaten atau pun kota. Dengan semakin kecilnya bentuk tipe pemerintahan daerah diduga akan mendorong meningkatnya kinerja pengungkapan *internet financial reporting*.

Disamping itu kesipan daerah untuk menerapkan *internet financial reporting* juga didukung oleh umur administratif. Ketika umur administratif sebuah daerah semakin panjang menunjukkan kelengkapan infrastruktur dan kesiapan dari pemerintah daerah untuk melakukan *internet financial reporting*, selain itu di dalam mendorong peningkatan *internet financial reporting*, pemerintah daerah yang ditugaskan tentu dibekali dengan karakteristik yang berpendidikan tinggi, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah akan mendorong kesiapan untuk melakukan *internet financial reporting*.

2. Teori *Signaling*

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi

antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang jelek (*bad news*).

Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang jelek. Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa isyarat adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang

prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual saham. Faktor asimetri informasi antara pemerintah dengan *stakeholder* publik, mendorong pemerintah untuk melaporkan kinerjanya termasuk pelaporan keuangan yang memadai salah satunya dengan melakukan praktik *internet financial reporting* (IFR).

Keterkaitan antara *signaling theory* dengan *internet financial reporting*, mengingat *signaling theory* berkaitan dengan informasi, didalam berinvestasi atau pun mengambil keputusan investor tentu akan mencari informasi yang tepat dan bisa dipercaya, salah satunya adalah dengan mengamati laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya upaya pemerintah melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet (*internet financial reporting*) diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau transparansi informasi bagi pengambil keputusan seperti investor, masyarakat, pemerintah pusat dan sebagainya.

Keterkaitan antara *signaling theory* dengan tipe pemerintah daerah juga sangat erat. Ketika tipe pemerintah daerah semakin kecil cakupannya seperti hanya dua daerah administratif yaitu kota dan kabupaten tentu pengelolaan dan pelaksanaan *internet financial reporting* akan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi konflik keagenan antara *agent* atau pun *principal*. Dengan adanya efektifitas dalam melaksanakan *internet financial reporting* akan mendorong

terjadinya transparansi informasi yang akan membuat ketimpangan informasi akan lebih kecil, serta mendorong citra instansi pemerintahan yang lebih baik.

Disamping itu *agency theory* juga berkaitan dengan umur administratif, semakin panjang umur administratif sebuah daerah tentu akan membuat implementasi *internet financial reporting* semakin kuat. Ketika sebuah daerah memiliki umur administratif yang semakin panjang tentu transparansi informasi semakin baik sehingga mengurangi terjadinya konflik keagenan. Disamping itu untuk terus memaksimalkan pengelolaan *internet financial reporting* maka sangat penting untuk menggunakan individu sebagai pemerintah daerah dengan level pendidikan yang tinggi dan kompleks, sehingga dengan bekal tersebut akan meningkatkan implementasi *internet financial reporting* dan mengurangi terjadinya konflik keagenan melalui transparansi informasi yang lebih baik.

3. Teori *Institusional*

Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian diinstitutionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual. Perspektif yang lain dikemukakan oleh Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995), yang mengklaim bahwa organisasi

berada dibawah tekanan berbagai kekuatan sosial guna melengkapi dan menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, karena struktur organisasi tidak ditentukan oleh situasi lingkungan tugas, tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi masyarakat secara umum dimana bentuk sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektifitas dan rasionalitas pada masyarakat.

Menurut Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian diinstitutionalkan dan dianggap sah dan diterima sebagai cara berpikir ala organisasi tersebut. Proses legitimasi sering dilakukan oleh organisasi melalui tekanan negara-negara dan pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi hanya sebagai simbol dan ritual. Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), melihat ada tiga bentukan institusional yang bersifat *somorphis* yaitu, (i) *coersifsomorphis* yang menunjukkan bahwa organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau masyarakat yang lebih luas, (ii) *mimesissomorphis*, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain, dan (iii) *normatifsomorphis*, karena adanya tuntutan profesional. Sementara konsep lain pada teori institusional menurut Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995) adalah *loose-coupling* yaitu teori institusional mengambil tempatnya sebagai sistem terbuka.

Coercivesomorphism (ketika organisasi terpaksa melakukan adopsi struktur atau aturan). *Mimeticsomorphism* (ketika organisasi mengkopi atau meniru organisasi lainnya, biasanya disebabkan karena ketidakpastian). *Normativesomorphism* (ketika orang mengadopsi berbagai bentuk karena tuntutan profesional organisasi sementara itu sendiri mengklaim bahwa mereka superior), Di Maggio dan Powell (1983) dalam Donaldson (1995), kemudian mengidentifikasi beberapa penyesuaian organisasi pada teori institusional.

Praktik *internet financial reporting*, menurut teori institusional dapat dipandang sebagai suatu adopsi praktik-praktik yang dapat diterima secara sosial dalam rangka memperoleh legitimasi dari *stakeholder* pemerintah daerah bahwa Pemda mempunyai kemampuan dan komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah (Ratmono, 2013).

Konsep utama dari *signaling theory* berkaitan dengan pentingnya informasi bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan. Ketika terdapat seorang *stakeholder* yang memiliki kelengkapan informasi yang lebih baik dari pihak lainnya, maka *stakeholder* tersebut akan dapat memperoleh abnormal return, akan tetapi hal yang sebaliknya akan terjadi, ketika informasi dapat diperoleh secara sempurna oleh seluruh *stakeholder*, maka persaingan akan menjadi lebih baik, karena keuntungan yang diperoleh akan lebih normal dan seragam antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya.

Keterkaitan antara *internet financial reporting* dengan teori institusional adalah dengan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuangannya dengan melakukan publikasi laporan keuangan melalui media internet maka semakin meningkatkan citra daerah dan nama baik aparatur pemerintah. Karena dinilai melakukan pengelolaan daerah khususnya keuangan daerah secara baik dan optimal. Dengan adanya *image* positif tersebut diharapkan akan semakin banyak investasi yang masuk ke Sumatera Barat khususnya pada 12 kabupaten dan 7 kota di Sumatera Barat.

Keterkaitan antara teori institusional dengan *internet financial reporting* sangat dekat, karena dengan memaksimalkan informasi melalui *internet financial reporting* maka akan mendorong meningkatnya image atau citra institusi. Untuk mendorong hal tersebut maka tipe daerah administratif tentu menjadi hal yang penting. Semakin kecil tipe daerah administratif akan semakin mudah melakukan pengelolaan terhadap implementasi *internet financial reporting*. Selain itu dalam rangka mendorong implementasi *internet financial reporting* juga dapat didukung oleh umur administratif, semakin panjang umur administratif sebuah daerah akan menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk menjadi reputasi institusi melalui transparansi informasi sebagai bagian dari *internet financial reporting*.

Disamping itu untuk mendorong transparansi informasi melalui *internet financial reporting* masyarakat melalui lembaga legislatif akan menempatkan tokoh pemimpin daerah yang memiliki karakteristik berpendidikan tinggi, sehingga melalui pendidikan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan implementasi *internet financial reporting* dengan baik dan tepat sehingga mendorong terjaganya nama baik institusi.

4. *Internet Financial Reporting (IFR)*

Internet Financial Reporting adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui *website* yang dimiliki perusahaan. (Kusumawardani, 2011). Dengan memberikan laporan melalui internet, perusahaan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih murah. (IASB, 1999 dalam Purba, 2012) membagi penggunaan internet sebagai saluran penyajian dan pendistribusian laporan keuangan pada tiga tahapan:

- a. Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran mendistribusikan laporan keuangan yang telah dicetak dalam format digital, seperti file dengan format pengolah kata atau *portable data file (PDF)*.
- b. Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan mereka dalam format *web*, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut.

c. Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut, sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format *file* atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Fitriana (2009) *Internet Financial Reporting* memiliki beberapa keuntungan antara lain :

- a. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta mengirim informasi perusahaan kepada investor.
- b. Sebagai media komunikasi masa untuk laporan perusahaan informasi dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan jumlah investor potensial.
- c. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang memudahkan dan bisa didownload *Adobe Acrobat Format* dalam *portable document format (PDF)* biasanya merupakan format yang paling umum digunakan

(Pervan, 2006 dalam Muyasaroh, 2014). Selain itu format yang digunakan adalah *HTML (Hypertext Markup Language)*, *Excel*, *XBRL*.

- d. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan.

Menurut Hargyantoro (2010) berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan keuangan melalui internet yakni:

- a. *Portable Document Format (PDF)* merupakan sebuah format *file* yang dikembangkan oleh *Adobe Corporation* untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai gambaran elektronik.
- b. *Hypertext Markup Language (HTML)* merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan informasi melalui internet.
- c. *Graphicsnterchange Format (GIF)* sebuah format file grafik, dengan meringkas mengenai gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat dibaca oleh kebanyakan pengguna.
- d. *Joint Photographic Expert Group (JPEG)* sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam *website*.
- e. *Microsoft Excel Spreadsheet* sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan menyimpan, memperlihatkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan lajur.

- f. *Microsoft Word Microsoft* merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak digunakan dalam IFR.
- g. *Zip Files Winzip* adalah program *windows* yang mengizinkan para pengguna untuk menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.
- h. *Macromedia Flash Software* Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.
- i. *Real Network Real Player Software* Format yang menggunakan efek video.
- j. *Macromedia Shockware Software Shockware* merupakan bagian dari *multimedia player*.

5. Type Pemerintahan

Tipe pemerintahan, yaitu pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, memiliki komposisi penduduk yang beragam. Penduduk di pemerintahan kabupaten umumnya melakukan urbanisasi sehingga populasi penduduk di pemerintahan kabupaten lebih homogen dibandingkan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota. Menurut Ingram, (1984) dalam Laswad, dkk (2005) urbanisasi memfasilitasi pembentukan koalisi, yaitu kumpulan pemilih, sehingga kepala daerah memiliki dorongan yang lebih besar untuk secara sukarela memberikan informasi guna pemantauan secara proporsional dengan wilayah metropolitan yang memiliki populasi penduduk

yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa daerah otonom di Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni Pemerintah Provinsi sebagai Daerah tingkat, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Daerah tingkat I dan Pemerintah Kecamatan sebagai Daerah tingkat II. Penelitian ini menggunakan daerah tingkat I, untuk membandingkan tipe pemerintah kabupaten dan kota dalam praktik *internet financial reporting*.

Kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi geografis maupun demografis. Kabupaten memiliki wilayah yang relatif lebih luas dan kepadatan penduduk lebih rendah daripada wilayah pemerintah kota. Daerah kota yang merupakan daerah urbanisasi relatif memiliki masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai serta tingkat pertumbuhan ekonomi dan akses internet yang tinggi (Ratmono, 2013). Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota/kabupaten, yakni daerah urban 72,41%, daerah rural urban 49,49%, dan daerah rural 48,25%.

Dengan tingkat akses internet yang tinggi, akan mendorong pemerintah kota cenderung melakukan praktik *internet financial reporting* dan lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan dalam *websitenya*. Menurut

BPS RI tahun 2017, masyarakat kota memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi (68,33%) daripada masyarakat kabupaten (66,20%). Berdasarkan teorinstitusional, *normative somorphism* (pemerintah kota akan melakukan praktik IFR karena adanya tekanan dari pelaku profesional) dan *mimetic somorphism* (pemerintah kota atau kabupaten akan meniru praktik IFR yang dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten yang lain yang sudah mendapatkan legitimasi publik).

6. Umur Administratif

Umur suatu organisasi dapat diartikan sebagai seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Umur administratif Pemda adalah tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan hasil evaluasinya akan ditindaklanjuti untuk memperbaiki penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.

7. Karakteristik Kepala Daerah

Kepala daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 merupakan badan eksekutif daerah yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah

otonomi yang lain sebagai badan. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menyelenggarakan pemerintahan daerah otonom menurut asas desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan bagi kepala daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan daerah kepada kepala daerah. Pertanggung jawaban dan akuntabilitas keuangan daerah diatur oleh kepala daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010: 25).

Peran kepala daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah sangat penting. Kepala daerah terpilih diharapkan adalah kepala daerah yang mempunyai kompetensi. Kompetensi *manager* pada sektor publik mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Dwyer dan Wilson, 1989), dan pemilihan eksternal auditor (Zimmerman, 1977). *Outcomes* dari sebuah organisasi baik sasaran strategis dan keefektifan merupakan refleksi nilai dan kognitif dari “aktor” di belakang itu semua. Data demografi *manager* potensial sebagai prediktor dari sasaran strategis dan tingkat kinerja organisasi (Hambrick dan Manson, 1984).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai determinan praktik *internet financial reporting* dalam lingkungan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia penelitian terkait topik tersebut telah dilakukan antara

lain oleh (Puspita & Martani, 2012), (Nosihana & Yaya, 2016), (Verawaty, 2015), (Rosita & Arifin, 2017), (Destya Winda Kholifa, 2018), (García & Garcíagarcía, 2010).

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis, Judul Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|
| 1. | (Puspita & Martani, 2012) Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda | Variabel Dependen Tingkat pengungkapan dalam <i>website</i> Pemda Variabel Independen 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Tingkat Ketergantungan 3. Ukuran Pemerintahan 4. Kompleksitas Pemerintahan 5. Belanja Daerah | 1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan 2. Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan 3. Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi, dan total pengungkapan 4. Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | | pengungkapan. |
| 2. | (Nosihana & Yaya, 2016) <i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia | Variabel Dependen <i>Internet Financial Reporting</i> Variabel Independen 1. Kompetisi Politik 2. Ukuran Pemda 3. <i>Leverage</i> 4. Kekayaan Pemda 5. Tipe Pemda 6. Opini Audit | 1. <i>Leverage</i> , kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap IFR 2. Kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap IFR |
| 3. | (Rosita & Arifin, 2017) Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah | Variabel Dependen Kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda Variabel Independen 1. Belanja Daerah 2. Umur Administratif 3. Kekayaan Daerah 4. Pendapatan per Kapita 5. <i>Leverage</i> 6. Pendapatan Asli Daerah | 1. Pendapatan per kapita, kekayaan daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda 2. Belanja daerah dan umur administratif berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda 3. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | keuangan daerah |
| 4. | (García & Garcíagarcía, 2010) <i>Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities</i> | Variabel Dependen Pengungkapan informasi Akuntansi sukarela di internet Variabel Independen 1. Ukuran Pemda 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Investment</i> 4. Kompetisi Politik 5. <i>Press Visibility</i> | 1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 2. Ukuran Pemda, <i>capital investment</i> , dan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela 3. <i>Press visibility</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela |
| 5. | (Destya Winda Kholifa, 2018) Determinan Praktik <i>internet Financial reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah | Variabel Dependen Aksesibilitas <i>Internet Financial Repoting</i> (IFR) Variabel Independen 1. Opini Audit 2. Tipe Pemerintah 3. Umur Administratif 4. Tingkat Ketergantungan 5. Jumlah Penduduk 6. Indeks Pembangunan Manusia 7. Tingkat Kesejahteraan Daerah | 1. Semua variabel berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> Pemda |

Puspita & Martani, (2012) Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas informasi dalam *Website* Pemda. Menunjukkan hasil penelitiannya:1. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten, presentasi pengungkapan, dan total pengungkapan. 2. Tingkat Ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan presentasi pengungkapan. 3. Ukuran Pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten, presentasi, dan total pengungkapan. 4. Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh positif terhadap presentasi pengungkapan.

Nosihana & Yaya, (2016) *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Menunjukkan hasil penelitiannya:1. *Leverage*, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit tidak berpengaruh terhadap IFR. 2. Kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap IFR. Verawaty, (2015) Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *E-Government* Pemerintah Daerah di Indonesia. Menunjukkan hasil penelitiannya:1. Tidak terdapat hubungan positif antara ukuran Pemda, pendapatan per kapita dan ukuran hutang terhadap aksesibilitas IFR. 2. Karakteristik penduduk, kultur mendokumentasi, dan tekanan politisi menjadi pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap laporan keuangan dalam *e-government*.

Rosita & Arifin, (2017) Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah. Menunjukkan hasil penelitiannya:1.

Pendapatan per kapita, kekayaan daerah, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* Pemda. 2. Belanja daerah dan umur administratif berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* Pemda. 3. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. García & Garcíagarcía, (2010) *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*. Menunjukkan hasil penelitiannya: 1. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. 2. Ukuran Pemda, *capital investment*, dan kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. 3. *Press visibility* berpengaruh negative terhadap pengungkapan sukarela.

6. Hipotesis Penelitian

A. Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa daerah otonom di Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni Pemerintah Provinsi sebagai Daerah tingkat, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Daerah tingkat I dan Pemerintah Kecamatan sebagai Daerah tingkat II. Penelitian ini menggunakan daerah tingkat I, untuk membandingkan tipe pemerintah kabupaten dan kota dalam praktik *internet financial reporting*.

Kabupaten dan kota memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi geografis maupun demografis. Kabupaten memiliki wilayah yang relatif lebih luas dan kepadatan penduduk lebih rendah daripada wilayah pemerintah kota. Daerah kota yang merupakan daerah urbanisasi relatif memiliki masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai serta tingkat pertumbuhan ekonomi dan akses internet yang tinggi (Ratmono, 2013). Menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, penetrasi pengguna internet berdasarkan karakter kota/kabupaten, yakni daerah urban 72,41%, daerah rural urban 49,49%, dan daerah rural 48,25%.

Dengan tingkat akses internet yang tinggi, akan mendorong pemerintah kota cenderung melakukan praktik *internet financial reporting* dan lebih banyak mengungkapkan informasi keuangan dalam *websitenya*. Menurut BPS RI tahun 2017, masyarakat kota memiliki indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi (68,33%) daripada masyarakat kabupaten (66,20%). Berdasarkan teori institusional, *normative somorphism* (pemerintah kota akan melakukan praktik IFR karena adanya tekanan dari pelaku profesional) dan *mimetic somorphism* (pemerintah kota atau kabupaten akan meniru praktik IFR yang dilakukan oleh pemerintah kota atau kabupaten yang lain yang sudah mendapatkan legitimasi publik).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahim & Martani (2018) dan Laswad et al (2005)) tipe pemerintah daerah kota atau kabupaten memiliki pengaruh terhadap praktik *internet financial reporting* di *website* pemerintah daerah.

Pada penelitian Ridwan (2019) yang menemukan bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Temuan yang sama diperoleh oleh Dwi dan Sari (2018) yang mengungkapkan semakin banyak jumlah kabupaten dan kota dalam sebuah provinsi akan cenderung menurunkan jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Selanjutnya hasil penelitian Setiawan (2017) menemukan bahwa semakin bertambah jumlah kabupaten dan kota yang melambangkan berbagai tipe pemerintah daerah mendorong menurunnya jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Semakin banyak jumlah kabupaten dan kota tentu mendorong sulitnya bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur teknologi, karena investasi teknologi membutuhkan biaya yang relatif besar dan waktu yang panjang. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

B. Pengaruh Umur Administratif Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Umur administratif pemerintah daerah dilihat dari tahun dibentuknya suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP. Pemda yang sudah lama berdiri akan belajar dari pengalaman masa lalu sebagai bahan evaluasi untuk periode selanjutnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan periode selanjutnya untuk mejalankan pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mendasarkan pada teori *signaling*, pemerintah daerah yang sudah lama berdiri akan menunjukkan sinyal kepada *stakeholder* publik dengan cara menyajikan LKPD pada *websitenya* berdasarkan pengalaman dan kemampuannya untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh umur administratif Pemda (Nosihana & Yaya (2016), Rahim & Martani (2016), Rosita & Arifin (2017) dan Destya Winda (2018)) memiliki pengaruh positif dan signifikan, artinya semakin lama umur administratif pemerintahan daerah maka

penyajian dalam laporan keuangan akan semakin baik. Mulyadi (2019) yang juga menemukan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Hasil penelitian yang sejalan diperoleh oleh Ridwan (2019) yang menemukan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada seluruh kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur. Temuan tersebut menunjukkan adanya variabel lain yang juga mempengaruhi jumlah pengungkap internet *financial reporting* seperti kompetensi, investasi teknologi dan sebagainya. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Umur administratif berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

C. Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Praktik *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pemerintah Daerah

Karakteristik kepala daerah memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Individu dengan latar pendidikan formal mempunyai informasi yang lebih banyak dan kompleks, karena tingkat pendidikan individu mencerminkan pengetahuan dan *skill* dasar dari individu tersebut. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi seseorang. Bagi pemimpin atau *top manager*, tingkat pendidikan akan membantu dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Amran dkk., 2014, dan Prasetya, 2014). Kepala daerah yang

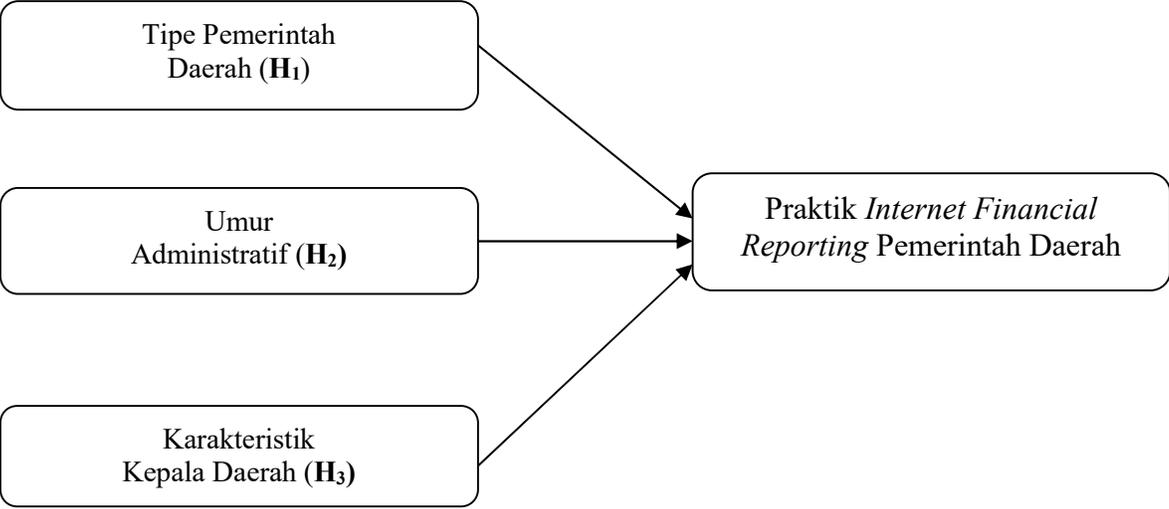
mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan mempunyai informasi yang lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan kepala daerah juga bertanggung jawab atas pengungkapan yang dilakukan.

Mulyadi (2019) yang menemukan semakin tinggi karakteristik kepala daerah yang diamati dari tingkat pendidikan formal yang dimilikinya akan mendorong menurunnya jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Temuan yang sama diperoleh oleh Ridwan (2019) yang menemukan bahwa bahwa semakin beragam pendidikan yang dimiliki aparatur kepala daerah akan mendorong mendorong menurunnya jumlah pengungkapan *internet financial reporting*. Selanjutnya hasil penelitian yang konsisten diperoleh oleh Mulyadi (2019) yang menemukan bahwa karakteristik kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*. Berdasarkan uraian diatas maka terbentuk hipotesis sebagai berikut ini. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Karakteristik kepala daerah berpengaruh positif terhadap praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah

D. Kerangka Konseptual

Penelitianni menggunakan dua jenis variabel, yakni variabel dependen (praktik *internet financial reporting* pemerintah daerah) dan variabel independen (tipe pemerintah daerah, umur administratif, dan karakteristik kepala daerah). Sehingga didapatkan kerangka penelitian sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejalan dengan uraian analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka dapat diajukan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
2. Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
3. Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah pengungkapan *internet financial reporting* pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kepada uraian kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka dapat diajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela *internet financial reporting*, dengan cara mencoba menyusun anggaran untuk membenahi infrastruktur jaringan internet yang dapat mendorong kemajuan dalam pengungkapan *internet financial reporting* di masa mendatang.

2. Pemerintah daerah diharapkan melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan teknologi berbasis jaringan kepada pihak terkait dan aparatur pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan dalam mengungkapkan *internet financial reporting*, dengan di tingkatkannya sosialisasi tersebut diharapkan dimasa mendatang jumlah pengungkapan *internet financial reporting* yang dicapai pemerintah daerah semakin tinggi sehingga menciptakan image positif dalam pandangan masyarakat.
3. Peneliti dimasa mendatang diharapkan menambahkan satu variabel baru yang juga mempengaruhi jumlah pengungkapan *internet financial reporting* seperti persepsi kemudahan, persepsi risiko dan berbagai variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet *Financial reporting* Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2): 100–109.
- Antonakis, j., Avolio, B., & Sivasubramaniam, N. (2003). Context and leadership : an examination of the nine factor full range leadership theory using the multifactor leadership questionnaire. *The Leadership Quarterly* 14 , 261-295.
- Agustiningsih, Wahyu, Sri. (2017). Audit Findings, Local Government Characteristics, and Local Government Financial Statement Disclosure. Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia. *Tinjauan Bisnis Integratif dan Penelitian Ekonomi*, Vol. 6, Edisi 3 179
- Awamleh, R., & Gardner, W. L. (1999). Perceptions of leader charisma and effectiveness: the effects of vision, content, delivery, and organizational performance. *Leadership Quarterly*, 10(3), 345–373.
- Bas A.S. Koene, A. L. (2002). Leadership effects on organizational climate and financial performance : Local leadership effect in chain organizations. *The leadership Quarterly* 13, 193-215.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2): 147-160.
- Donaldson, L and Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1): 49-64.
- Febrianty S.Y., dan Jatmiko W.T. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*. <http://eprints.undip.ac.id/>.
- García, A. C., & García-garcía, J. (2010). Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5): 679–695.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Ismoyo, Rudi (2010) Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah dan Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Kholifah, Winda, Destya. (2017). Determinan Praktik *Internet Financial reporting (IFR)* dalam Website Pemerintah Daerah. F.E Universitas Islam Indonesia.
- Krisnadi, Amalia., & Tarigan, Josua. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan melalui Perilaku Manajer atas Isu Manajemen Lingkungan sebagai Variabel Intervening.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants Of Voluntary Internet *Financial reporting* By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 101–121.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. Tesis. FE UNS. Surakarta.
- Mahmudi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubarak, Ahmad & Darmanto, Susetyo. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Intervening. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang*.Maksimum Vol.5 No.1 September 2015 – Februari 2016.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial reporting* Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
- Nur Azlina dan Ira Amelia 2014 : Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2*.
- Pradipa, Nyoman Angga., Putri, IGAM. Asri Dwija., Ratnadi, Ni Made Dwi. (2016) *Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Hubungan Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Provinsi Bali)*
- P, Aditya, Rahman., Sutaryo., & Budiarmanto, Agus. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-28 September 2013*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03 Tahun 2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–25, September 2012.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Ratmono, D. (2013). Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2): 28-48.
- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–26, September 2017.
- Sari, Widya, Embun. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*.
- S, R, A, Risqa, Ladya., & Arifin, Johan. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah.
- Setiawan, Wahyu. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.

- Setyaningrum Febriyani dan Dyah Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 154-170.
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20: 571-611.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of *Financial reporting* of U.S. Municipalities On The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1): 56-92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet *Financial reporting* Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, September 2015.
- Yurisca Febriyanty Sinaga. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Universitas Diponegoro.